



Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba

Natalia Sihombing¹⁾; Tunggul Sihombing²⁾

^{1,2)} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Email: ¹⁾ nataliaahombing17@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received 02 Januari 2023]

Revised [31 Mei 2023]

Accepted [17 Juni 2023]

KEYWORDS

Policy Evaluation, Community Empowerment, BUMDes

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif guna menggambarkan fenomena sebenarnya dari kejadian dilapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan mengalami beberapa kendala dalam hal sarana prasarana dikarenakan adanya keterbatasan dana yang dimiliki serta masih minimnya masyarakat yang berpartisipasi karena masih berpikir primitif. Oleh karena itu, peneliti melakukan evaluasi dengan teori evaluasi William N Dunn yang mencakup efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini. Peneliti mendapati bahwa kendala yang paling besar terletak pada sumber dana yang masih sangat minim lalu dilanjutkan oleh masalah SDM. Langkah selanjutnya peneliti memberikan beberapa masukan seperti melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menutupi masalah dana, dan agar memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam mengelola unit usaha sebagai langkah memupuk jiwa kewirausahaan.

ABSTRACT

The research method used is descriptive qualitative in order to describe the actual phenomenon of events in the field. Data collection techniques use interviews, observations, and documentation related to the study. The results showed that the implementation of community empowerment that was carried out experienced several obstacles in terms of infrastructure due to limited funds owned and the lack of participating communities because they were still thinking primitively. Therefore, the researcher conducted an evaluation with William N Dunn's evaluation theory which included effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy as benchmarks in this study. Researchers found that the biggest obstacle lies in the source of funds which is still very minimal and then continued by HR problems. The next step is for researchers to provide some inputs such as collaborating with third parties to cover up funding problems, and to provide training to the community in managing business units as a step to cultivate an entrepreneurial spirit.

PENDAHULUAN

Seperti yang telah di amanahkan dalam peraturan perundangan yang dikutip dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terdapat pada pasal 87 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), desa diwajibkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu langkah untuk program pemberdayaan masyarakat dalam mengentas kemiskinan yang mana BUMDes merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Peraturan yang sama kaitannya tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes oleh Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Selanjutnya, pemerintah desa akan menerbitkan dan menyusun Perda tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Pakkodian adalah salah satu BUMDes yang telah beroperasi selama kurang lebih 4 tahun di Desa Lintong Nihuta. Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Alasan utama pemilihan BUMDes Pakkodian sebagai objek penelitian adalah karena BUMDes pakkodian merupakan unit ekonomi yang sedang berkembang. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki (Suharto, 2006:76) lalu (Sulistiyani, 2004:80) mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Pola pembinaan pemberdayaan masyarakat menitikberatkan kepada partisipasi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat diajak terlibat guna mengarahkan kegiatan yang

berhubungan langsung dengan mereka yang berkaitan dengan program. Mekanisme kerja dilaksanakan dengan mewadahi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam kelembagaan secara profesional yang berlandaskan pada potensi sumber asli dari desa. BUMDes di desa Lintong Nihuta resmi terbentuk pada tanggal 22 oktober 2018 yang diinisiasi oleh Kades, BPD dan juga masyarakat Desa bekerja sama dengan Pemerintah Desa, lalu diberilah nama "BUMDes Pakkodian". Kemudian BUMDes disahkan oleh Bapak Kepala Desa serta ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes). Hasil wawancara dan juga pengamatan langsung di lapangan tentang program usaha yang dikelola BUMDes Pakkodian telah berjalan beberapa unit untuk kebutuhan masyarakat. Program pertama, bergerak di bidang pariwisata yang dijalankan dengan melibatkan partisipasi aktif warga desa sehingga mampu meningkatkan perekonomian serta pemberdayaan masyarakat sekitar. Program yang kedua, yaitu unit sewa alat musik pesta. Namun keberadaan BUMDes belum sepenuhnya memenuhi dan meningkatkan pendapatan desa dikarenakan minimnya sumber dana dan kendala SDM. Salah satu langkah konkrit dalam penguatan SDM BUMDes adalah dengan melaksanakan diklat/pelatihan kepada pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes dibekali pelatihan sebelum terjun karena latar pendidikan yang setara dengan SLTA. Kenyataan yang didapat di lapangan pengurus melaksanakan kewajiban kurang maksimal, karena usaha yang dilakukan dalam menarik partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berhasil, masih banyak masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam program BUMDes, karena usaha yang dilakukan hanya sebatas sosialisasi. Meskipun penyebab minimnya masyarakat yang berpartisipasi bukan hanya faktor dari pengurus BUMDes tapi juga masih banyak masyarakat yang berpikiran bahwa BUMDes itu hanya milik pemerintah, dan untungnya juga hanya untuk pemerintah. (Pitana, 2011:6) menyatakan bahwa terdapat usaha dalam melakukan pemberdayaan yaitu *enabling, motivating, educating, encouraging, protecting, empowering, oportuning, devoluting*. Kurang maksimalnya usaha pengurus dalam memotivasi, mengedukasi, dan memberi dorongan berdampak terhadap jumlah masyarakat yang mau ikut berpartisipasi. Seharusnya pengurus lebih memaksimalkan usaha pemberdayaan dengan mengikuti pola usaha pemberdayaan masyarakat agar semakin banyak masyarakat yang terbuka pola pikirnya sehingga mau berpartisipasi dalam program BUMDes. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan terdapat dua permasalahan. Pertama adalah 1) bagaimana cara menumbuhkan partisipasi masyarakat 2) bagaimana cara mengatasi sumber dana yang minim untuk kemajuan sarana prasarana pendukung program BUMDes. Dari kedua permasalahan yang ada tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk 1) menumbuhkan dan menggali partisipasi serta kreatifitas masyarakat dan 2) mengatasi kekurangan dana BUMDes. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah partisipatif. Pendekatan yang berfokus dalam sarana peningkatan peran serta masyarakat secara aktif dalam berbagai proses. Anderson (dalam Winarno 2002:166) menyebutkan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Mengevaluasi adalah tujuan utamanya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba beberapa waktu lalu dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Direktur, Kepala Bidang Pariwisata dan Sewa Alat Musik serta beberapa masyarakat desa yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Selain melakukan wawancara pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi langsung dan dokumentasi. Lalu peneliti menganalisis data dengan mereduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data hingga akhirnya penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN DAN TEMUAN

Penelitian ini dilakukan tepatnya di BUMDes Pakkodian yang berlokasi di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba. (Dunn, 2003:610) menyatakan kriteria efektivitas (*effectiveness*) mengarah pada hasil. Kriteria efisiensi (*efficiency*) mengarah pada jumlah usaha yang diperlukan. Kriteria kecukupan (*adequacy*) mengarah pada seberapa jauh pencapaian hasil memecahkan masalah. Kriteria



perataan (equity) mengarah pada distribusi pelayanan kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Kriteria responsivitas (responsiveness) mengarah pada hasil kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ketepatan (appropriateness) mengarah pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program. Aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Efektivitas (effectiveness)

Kriteria efektivitas biasanya diukur dari unit pelayanan yang diberikan. Efektivitas dari pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba hingga saat ini dapat terlaksana dengan cukup baik yakni ditunjukkan dengan adanya pemahaman organisasi pelaksana yang baik tentang BUMDes dalam upaya memberdayakan masyarakat hal ini ditunjukkan oleh penyampaian informasi yang baik melalui sosialisasi yang dilakukan oleh setiap pengurus BUMDes yang bertanggungjawab dalam sosialisasi, jadi siapapun pengurus BUMDes yang bertugas, sudah cakap dalam pemahaman maupun penyampaian informasi lewat sosialisasi kepada masyarakat di balai desa.

Menurut Dunn (2003;610) bahwa efektifitas berkenaan apakah sebuah kebijakan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terlihat bahwa adanya hasil yang tercapai yakni melalui sosialisasi kepada masyarakat mengakibatkan sebagian masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam menjalankan program BUMDes yang berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat setelah adanya BUMDes.

Efektivitas berupa penyampaian informasi yang dilakukan dengan baik oleh organisasi pelaksana terhadap kelompok sasaran yang berguna agar kelompok sasaran mengetahui apa itu BUMDes, apa saja program-programnya, apa saja syarat-syaratnya, apa saja manfaat serta tujuan didirikannya BUMDes serta semakin paham tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kebijakan yang sedang berjalan agar masyarakat mau berpartisipasi sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

Efisiensi (efficiency)

Dunn (2003;610) menyatakan bahwa efisiensi merupakan sinonim rasionalitas ekonomi, yakni hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari nilai moneterinya. Efisiensi sering disebut dengan jumlah usaha yang dikeluarkan untuk mencapai tingkat efektifitas tertentu. Kriteria efisiensi yang ditekankan di bagian ini yaitu menyangkut sumber daya dan sumber dana. Keduanya sama-sama faktor yang paling penting dalam kriteria efisiensi, apabila pegawai bekerja dengan optimal, tahu tentang apa yang harus dikerjakan dan yang harus dilakukan, maka efisiensi untuk mencapai tujuan dari kebijakan akan tercapai, karena pegawai merupakan sumber daya untuk menjalankan suatu kebijakan/program. Tanpa adanya SDM tidak mungkin suatu program bisa berjalan, dan juga kinerja dari pegawailah yang menentukan kualitas suatu program.

Hasil penelitian tentang evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes menunjukkan bahwa kriteria efisiensi dari sumber daya sudah cukup baik, dapat dilihat dari kuantitas serta kualitas organisasi pelaksana BUMDes. Dari segi kuantitas, pegawai BUMDes sudah cukup dan tidak berlebihan. Semua ditempatkan pada posisi masing-masing, tidak ada yang merangkap sehingga para pegawai BUMDes bisa bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Kuantitas yang cukup harus didukung juga dengan kualitas pegawai yang cukup baik. Kualitas pegawai BUMDes dapat dikatakan cukup baik karena masing-masing mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. Terlebih lagi ketika mereka diangkat menjadi pegawai, para pengurus menerima diklat (pelatihan) dari kecamatan yang berguna menunjang kemampuan para pegawai supaya sesuai dengan sumber daya yang dibutuhkan.

Dari segi sumber dana, peneliti mendapati bahwa penyertaan modal BUMDes hanya berasal dari dana desa saja. Modal tersebut dipergunakan oleh organisasi pelaksana untuk kebutuhan BUMDes seperti membangun beberapa fasilitas penunjang dibidang pariwisata dan alat musik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat ayunan, tempat duduk, kios. Penyertaan modal yang hanya berasal dari dana desa inilah yang menjadi kendala bagi BUMDes. Dari segi pendanaan masih kurang terkhusus di bidang sewa alat musik pesta. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas di bidang unit usaha alat musik masih sangat kurang, masih hanya memiliki sound dan keyboard karena keterbatasan modal yang dimiliki.

Sehingga program BUMDes di bidang alat musik lumayan terhambat. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan direktur BUMDes tentang saran kerjasama dengan pihak ketiga, BUMDes sedang mengupayakan hal tersebut melalui rapat.

Kecukupan (adequacy)

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. (Dunn, 2003:610)

Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan upaya yang dilakukan oleh organisasi pelaksana terhadap partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti mendapati bahwa kriteria kecukupan dalam evaluasi kebijakan pemberdayaan melalui BUMDes di Desa Lintong Nihuta masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang masih kurang, masih hanya sebagian masyarakat yang peduli dengan keberadaan BUMDes sebagian lagi kurang peduli. Masih ada masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam menjalankan program BUMDes, masih ada masyarakat yang masih sulit menerima keberadaan BUMDes karena pola pikir yang masih primitif yang menganggap bahwa BUMDes tersebut adalah milik pemerintah saja dan untuk kesejahteraan pemerintah saja, bukan untuk masyarakat sehingga mereka lebih memilih untuk bertani saja.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Maka dapat dinyatakan bahwa pemerintah hanya berupaya mengenalkan BUMDes lewat sosialisasi kepada masyarakat. Tentang upaya yang dilakukan oleh BUMDes juga masih kurang karena hanya sebatas melakukan sosialisasi dan itupun tidak rutin, akan lebih baik jika BUMDes mengoptimalkan sosialisasi dengan mencanangkan sosialisasi sebagai kegiatan rutin setiap bulan serta melakukan pendekatan lebih guna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta membuka pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa BUMDes adalah milik pemerintah dan keuntungannya hanya untuk pemerintah. Dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dapat menolong masyarakat bisa perlahan-lahan menerima keberadaan BUMDes.

Perataan (equity)

Dunn (2003:610) menyatakan bahwa perataan (equity) berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang secara adil didistribusikan. Kriteria perataan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran untuk mendistribusikan resources dalam masyarakat. Dalam hal pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) para organisasi pelaksana tentu harus memberikan pelayanan secara merata tanpa membedakan status sosial kepada masyarakat Desa Lintong Nihuta sebagai kelompok sasaran.

Peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam program BUMDes pada tanggal 13 September 2021, yang menunjukkan: sebagian masyarakat sedang berjualan makanan/minuman melalui kios yang disewakan ke masyarakat desa, ada juga yang berkegiatan sebagai pemungut karcis bagi pengunjung yang datang. Kemudian peneliti mengamati aktivitas petugas kebersihan, yakni masyarakat yang bertugas membenahi lokasi pariwisata seperti memabat rumput liar dan memperhatikan tanaman di sana. Peneliti juga mengamati kegiatan pemain dan penyanyi alat musik pesta di Desa tersebut. Semuanya melakukan masing-masing kegiatan dengan baik sesuai dengan bagiannya.

Peneliti mendapati bahwa masyarakat yang berpartisipasi di dalam program BUMDes diberikan pelayanan yang merata, bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi diberi kebebasan memilih sesuai dengan kebutuhannya atau kemampuannya.

Responsivitas (responsiveness)

Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003:610).



Dalam pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba tentunya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Fasilitas tersebut berasal dari pengelolaan modal yang bersumber dari dana desa. Dana desa diolah untuk memfasilitasi bidang usaha yang dikelola BUMDes dengan membangun beberapa sarana prasarana dibidang pariwisata seperti: kios, tempat duduk, ayunan, relief ulos, gapura hariara punsu, spot photo, dan tempat sampah. Untuk bidang alat musik dilengkapi fasilitas sound dan keyboard.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa Responsivitas pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes dapat dikatakan kurang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan fasilitas yang dimiliki BUMDes. Fasilitas fisik sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program, di mana karena di setiap aktivitas tentunya membutuhkan peralatan sebagai media.

Fasilitas yang dimiliki BUMDes Pakkodian dalam program pemberdayaan masyarakat dibidang pariwisata seperti 6 los kios, ayunan, tempat duduk, relief ulos, gapura hariara punsu, tempat sampah, dan spot photo sudah cukup memadai, untuk taraf pengembangan, fasilitas tersebut berfungsi dengan baik meskipun sebagian sudah agak rusak saat digunakan dan sebenarnya masih perlu ditambahi dan dibenahi sedikit lagi untuk meningkatkan kualitas fasilitas di sana. Sementara di bidang alat musik masih sangat kurang memadai karena keterbatasan alat musik yang dimiliki BUMDes Cuma ada keyboard dan sound, sehingga dianggap kurang memenuhi standar pelayanan BUMDes. Penyebabnya adalah karena kurangnya modal, walaupun begitu hal tersebut tidak menjadi pematah semangat bagi para organisasi pelaksana.

BUMDes tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki saat ini. BUMDes sebisa mungkin melayani masyarakat dan berusaha memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang di lakukan oleh peneliti di lapangan, apa yang disampaikan melalui wawancara dengan hasil pengamatan di lapangan memang benar begitu adanya. Kurangnya dana karena sumber dana masih hanya dari dana desa membuat BUMDes memiliki keterbatasan dalam fasilitas. Untuk itu kriteria responsivitas, terlihat sudah kurang baik dan masih harus dibenahi. Mudah-mudahan rencana kerja sama dengan pihak ketiga bisa segera direalisasikan, agar BUMDes Pakkodian semakin jaya.

Ketepatan (appropriateness)

Dunn (2003;610) menyatakan bahwa ketepatan (appropriateness): kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Apakah kebijakan yang dibuat sudah tepat sasaran? Apakah sudah tepat dengan kebutuhan kelompok sasaran atau tidak.

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba, lebih mengarah pada ketepatan antara program yang dibentuk dengan kebutuhan masyarakat, apa saja keuntungan sebelum dan sesudah adanya BUMDes bagi masyarakat. Melalui wawancara dapat diketahui bahwa program/bidang usaha yang dikelola BUMDes sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Lintong Nihuta. Selanjutnya peneliti tertarik ingin mengetahui tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan BUMDes Pakkodian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mendapati bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Oleh BUMDes menyambut kebijakan dengan baik dengan adanya program/bidang usaha yang dikelola BUMDes ini karena mereka berpendapat bahwasannya program yang dibuat BUMDes ini berdampak positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara cepat dan tepat.

Berdasarkan kedua bidang masyarakat yang terlibat merasakan dampak yakni bertambahnya sumber penghasilan, serta mendapat kemudahan dalam mengembangkan usaha produktif dengan harga sewa yang relative murah, bakat-bakat yang terpendam juga jadi tersalurkan serta ketika ingin menyewa alat musik masyarakat tidak perlu kewalahan lagi untuk acara kecil-kecilan meskipun belum bisa disewa untuk acara adat besar, dan ini sangat berbeda bila dibandingkan sebelum BUMDes Pakkodian didirikan,

bahwa sebagian masyarakat hanya berpatok pada hasil pertanian, tetapi semenjak BUMDes hadir di Desa Lintong Nihuta, walaupun masih dalam tahap pengembangan, masih banyak yang harus dibenahi tapi setidaknya sudah memberi sedikit manfaat bagi masyarakat yang terlibat. Masyarakat yang tidak ikut terlibat dalam program BUMDes yang memiliki homestay secara tidak langsung juga ikut terkena dampaknya, banyaknya wisatawan yang datang berkunjung mengakibatkan homestay masyarakat disana jadi laku. Apabila semua masyarakat turut serta berpartisipasi mendukung pengembangan BUMDes, serta fasilitas di bidang alat musik dilengkapi, dan di bidang pariwisata semakin di *upgrade*. Maka kedepannya BUMDes akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa Lintong Nihuta.

Danau Toba sebagai aset yang memiliki dea tersebut memiliki harga jual yang sangat tinggi, indahnya pemandangan dari spot desa Lintong Nihuta khususnya di bagian pariwisata BUMDes menjadikan ramai sekali wisatawan yang datang kesana, bahkan tidak heran di lokasi pariwisata BUMDes sering sekali orang-orang melakukan photo *prewedding* di sana.

Masyarakat juga menyediakan meja, kursi dan tikar di kiosnya bagi pengunjung yang hendak makan, minum atau sekedar mengobrol di kios. Terdapat juga speaker, kajan, dan gitar milik pribadi yang dipakai masyarakat untuk menambah daya tarik kiosnya agar banyak pengunjung terutama kalangan anak muda untuk singgah kekiosnya, sambil makan/minum, sambil cerita, sambil bermain, sambil menikmati pemandangan Danau Toba, sehingga secara otomatis dagangan masyarakat yang menyewa kios akan laku. Begitulah bentuk pemasaran yang dilakukan oleh BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti menilai masyarakat yang menerima pelayanan yang diberikan BUMDes cukup puas karena mereka merasakan dampak positif. Hal ini terlihat dari respon positif masyarakat ketika diwawancarai. Tentunya hal ini tidak terlepas dari usaha-usaha para penanggungjawab kebijakan yaitu Bapak Kepala Desa dan Direktur BUMDes yang selalu berkoordinasi dalam melakukan pengawasan, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan jika di tengah jalan menimbulkan suatu permasalahan dapat langsung mengambil arah kebijakan guna memperbaiki pelayanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan minimnya partisipasi masyarakat serta minimnya sarana prasana setiap unit usaha karena keterbatasan dana, meskipun dalam beberapa tahun terakhir BUMDes telah membawa perubahan bagi masyarakat desa, masyarakat lebih terbantu setelah adanya BUMDes dibandingkan dengan sebelum adanya BUMDes hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan terhadap perekonomian masyarakat. Jika dibandingkan dengan sebelum adanya BUMDes dan sesudah adanya BUMDes masyarakat lebih terbantu perekonomiannya akibat dampak dari program yang dikelola BUMDes khususnya di bidang pariwisata.

Selain peningkatan ekonomi, bakat masyarakat juga bisa tersalurkan, masyarakat dapat mengembangkan usaha produktifnya dan bertambahnya sumber pendapatan. Walaupun penyertaan modal yang dimiliki BUMDes masih hanya dari dana desa dan fasilitas yang dimiliki BUMDes masih minim terkhusus di bidang alat musik tidak menjadi penghalang bagi BUMDes untuk tetap berdiri, justru hal ini menjadi tonggak semangat bagi para pengurus BUMDes, para pengurus sudah mengagendakan akan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menambah sumber modal.

Peneliti juga mendapati bahwa sumber daya manusia (organisasi pelaksana) sudah efisien baik dari segi kuantitas di mana para pengurus BUMDes pas pada posisi masing-masing dan dari segi kualitas dapat dilihat dari kinerja para pegawai yang cukup baik, karena setelah pemilihan pengurus BUMDes, pihak kecamatan memberikan pelatihan/diklat terlebih dahulu untuk menunjang kemampuannya.

Dari segi pelayanan tidak ada masyarakat yang mengalami diskriminasi pelayanan dan yang terakhir peneliti mendapati bahwa program/bidang usaha yang dikelola BUMDes sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat jadi memiliki tempat untuk mengembangkan usaha produktif serta dapat menambah sumber penghasilan selain dari bertani. Di bidang alat musik juga sesuai kebutuhan walaupun masih belum lengkap, tetapi jika masyarakat ingin melakukan pesta kecil-kecilan masyarakat tidak kesusahan lagi jika ingin menyewa alat musik dan tentunya harga yang didapat lebih murah.



DAFTAR PUSTAKA

- Albrow Martin. (2004). Birokrasi. Penerjemah; M Rusli Karim dan Totok Daryanto. Tria Wacana; Yogyakarta.
- Ambar Teguh Sulistiyani, & Rosidah. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Amirin, Tatang M. (2000). Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bagong Suyanto dan Sutinah. (2006). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. (1990). Public Policy Analysis: An Introduction. United States of America: Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc.
- _____. (1998). Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Edi, Suharto. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.
- Husein, Umar. (2004). Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Cet ke 6, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Iskandar. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada.
- _____. (2013). Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. (Referensi, Jakarta)
- Jamaludin. (2015). Sosiologi Pedesaan. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Mardikanto, Totok. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan public Edisi Revisi. Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2003). Public Policy. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Pitana, I Gde. (2011). "Pemberdayaan dan Hiperdemokrasi dalam Pembangunan Pariwisata", dalam I Nyoman Darma Putra dan I Gde Pitana (ed). Pemberdayaan dan Hiperdemokrasi dalam Pembangunan Pariwisata, pp: 1-27. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- _____. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supardi. (2019). Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa. Jakarta Selatan:UAI Press
- Widiastuti, Siti Kurnia, dkk. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Marginal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarmo, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wirawan. 2011. Evaluasi: Teori, model, standar, aplikasi dan profesi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, Dhendy. (2015). "Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014-April 2015)". JESP-Vol. 7, ISSN2086-1575.
- Safinatunnajah. 2020. "Evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bangun Seranten Kabupaten Tebo Provinsi Jambi."
- Purnamasari, Hanny, & Ramdani, Rachmat. (2019). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang. International Journal of Demos, ijd.v1i1.8
- Bachri, S.,Bachtiar. (2010). Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No. 1, April2010(46-62)
- Sihombing, N. 2021. *Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba*. Medan: Repository USU
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

